

BAB I

PENDAHULUAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

1. Latar Belakang Masalah

Kemajemukan masyarakat Indonesia dilihat dari latar belakang etnis, sosial budaya dan religi sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Adanya pluralitas tersebut merupakan khazanah kekayaan nasional sekaligus memiliki potensi konflik jika tidak dipelihara dengan serius. Oleh karena itu masalah integrasi bagi bangsa Indonesia yang keadaan masyarakatnya sangat majemuk merupakan persoalan strategis, karena integrasi menjadi dasar bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus menjadi prasyarat terciptanya stabilitas nasional yang sangat diperlukan bagi kesuksesan pembangunan nasional. Terjadinya beberapa konflik di tanah air akhir-akhir ini telah menyebabkan pembangunan di Indonesia kurang berjalan lancar, bahkan mengancam integrasi bangsa.

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu faktor yang menentukan dan perlu mendapat perhatian untuk terciptanya integrasi Indonesia. Sebab agama acapkali dinyatakan sebagai faktor pengikat yang mempertautkan masyarakat, terkadang juga dipandang sebagai sumber pertentangan dan konflik horizontal dan vertikal. Hal itu dapat dilihat dalam masyarakat yang berbeda agama ada kecenderungan kuat untuk memegang identitas agamanya menjadi identitas golongan sosial. Dengan identitas tersebut maka batas-batas dan perbedaan sosial atau bahkan pertentangan bisa muncul sebagai akibat doktrin agama yang dianutnya.

(Rifai, 2003: 20)

Menurut Madjid (1994: 237) hampir setiap agama secara normatif mempunyai misi untuk menyebarkan ajaran agamanya kepada seluruh manusia untuk menjadi tuntunan hidup dengan dasar klaim kebenaran dan kemutlakan hanya satu, tidak mungkin dua, konsekwensinya agama yang lain salah. Atas dasar itu maka isu agama menjadi sangat sensitif dalam kehidupan manusia.

Ada beberapa dogma menurut Nasution (1995: 272) yang menyebabkan intoleransi antar penganut agama, karena berhadapan dua keyakinan yang berbeda seperti dalam agama Kristen tentang dosa warisan yang tidak dapat dihapus kecuali percaya kepada Yesus sebagai penebus dosa dan gereja jelas merupakan wakil Yesus di dunia ini serta pengantara manusia dengan Tuhan. Orang yang tidak masuk gereja tidak bisa suci dosanya, dengan demikian tidak akan memperoleh keselamatan. Sedang dalam agama Islam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Muhammad sebagai rasul-Nya adalah ajaran terpenting. Orang yang diterima dan selamat hanyalah apabila meyakini kedua doktrin tersebut.

Kendati demikian, tidak seluruh ajaran agama tersebut bersifat misi / dakwah, agama pada dasarnya selalu disertai dengan dua muka (*double face*) yaitu eksklusif dan inklusif (Efendy, 2001: 7). Disamping sebagai misi, beberapa doktrin agama juga mengajarkan toleransi, menghargai keragaman untuk hidup secara harmonis sesama pemeluknya atau dengan penganut agama lain. Terjadinya konflik agama pada umumnya dikarenakan faktor kepentingan para pemeluknya yakni ekonomi sosial dan politik, artikulasi yang salah dalam memaknai ajaran agama, maupun terjadinya gesekan kebudayaan (Efendy, 2001: 27).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Berger (Depag RI, 2003: 13) bahwa konflik agama cenderung disebabkan oleh obyektifikasi yang berlebihan

(pendewaan) terhadap agama dan ajarannya sehingga menutup pandangan dan dialog terhadap agama lain. Cara seperti ini dipengaruhi juga oleh *vested interest* pemeluknya maupun *politik interest* kelompok tertentu. Dengan demikian pemahaman dan perilaku beragama secara empirik sangat banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya yang dianut maupun kepentingan-kepentingan mereka yang ada dalam suatu masyarakat.

Dalam tesis ini akan dibahas tentang toleransi beragama di Balige kaitannya dengan keharmonisan masyarakat, yang salah satunya disebabkan oleh peranan *Dalihan Na Tolu* sebagai falsafah hidup masyarakatnya. Topik ini dianggap penting mengingat di daerah ini masyarakatnya cukup majemuk dari aspek agama dan etnik, dengan dorongan untuk menyampaikan misi agama tertentu namun tidak mempengaruhi hubungan mereka sehingga tidak terdapat eskalasi konflik agama yang signifikan sejak masa kemerdekaan, pada era Orde Baru maupun pasca tumbangannya kekuasaan Soeharto tahun 1998.

Keharmonisan itu disebabkan oleh sikap dan pandangan hidup masyarakat setempat yang menempatkan adat dan budaya lokalnya sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yang totalis. Menurut Bruner dalam Jhromi (2000: 166) orang Batak yang menjadi penduduk asli daerah Toba sangat sadar akan pluralisme etnik dan budaya daerah khususnya di Indonesia. Mereka juga menjadikan sistem kekerabatan sebagai pengatur mekanisme hubungan sesama manusia khususnya pada kelompok yang termasuk dalam sub etnik Batak.

Hal yang paling menentukan dalam kerukunan beragama masyarakat Toba adalah dilatarbelakangi pandangan kosmologi tentang relasi antara Tuhan dengan alam, atau antar sesama manusia dalam prinsip *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu*

merupakan sistem totalitas eksistensi masyarakat Batak (Harahap, 87: 65) dimana di dalamnya ada *Hulahula* (Kelompok pemberi istri), *Boru* (penerima istri) dan *Dongan Tubu* (Saudara). *Dalihan Na Tolu* (Tungku berkaki tiga) keberadaannya tidak hanya eksis dalam alam profan melainkan bersumber dari alam sakral yang diidentikkan dengan keberadaan 3 dewa, atau tiga alam. Konsep *Dalihan Na Tolu* hampir melekat pada seluruh masyarakat Batak yang menyebabkan mereka menjadi type masyarakat terbuka, memahami relativisme kedudukan manusia.

Sungguhpun demikian, *Dalihan Na Tolu* menurut Simanjuntak (2002: 433) terkadang bisa menjadi sumber konflik hubungan sesama masyarakat Batak Toba dalam arena sosial dan interu agama Kristen serta adat, menurutnya konflik telah melekat dalam kehidupan mereka. Namun dalam pandangan penulis hal ini tidak berlaku dalam hubungan antar agama yakni antara Kristen dan Islam. Bahkan telah menjadi alat perekat harmonis dan tolerannya pola kehidupan beragama di Balige.

Hubungan antara agama yang bertradisi besar (Kristen - Islam - Katolik) di daerah Toba khususnya Balige, dalam perspektif sejarah sudah dibuktikan dengan adanya toleransi dan keserasian sesama mereka, dan kedekatan Raja Sisingamangaraja XII dengan Sultan Aceh dalam menghadapi Belanda. Meskipun pemakaian terhadap term toleransi terdapat dua pengertian yakni pertama, *negatif interpretation of tolerance* (interpretasi negatif), maksudnya setiap penganut agama hanya membiarkan, tidak menganggap musuh, tidak mengganggu pemeluk agama yang lain dalam hidup dan menjalankan ajaran agamanya. Kedua, *posttif interpretation of tolerance*, ialah memberikan dukungan terhadap kelompok lain terutama berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan atau kegiatan agama lain yang sifatnya tidak ibadah formal kepada Tuhan (Depag RI, 2003: 03).

Sebelum kedatangan agama-agama besar di daerah Toba (Balige) secara primordial telah mempunyai pranata sendiri yang mengatur tentang hubungan sesama mereka maupun dengan kelompok lain yang berbeda yakni sistem kekerabatan yang patrimonial sejati dan *Dalihan Na Tolu*. Sistem tersebut menjamin adaptasi yang baik dengan agama yang baru masuk, sebab telah menjadi tradisi masyarakat untuk menghargai keragaman (pluralisme) . Model seperti itu menurut Suparlan (1994: 3) lebih menguntungkan, karena pendekatan budaya terhadap agama akan lebih efektif untuk mengetahui kondisi lokal suatu masyarakat dan akan lebih menumbuhkan rasa toleransi.

Masyarakat Balige mayoritas merupakan penganut agama Kristen dan Katolik, sedang pemeluk agama Islam dan Parmalim hanya sebagai minoritas. Hingga saat ini di daerah ini masyarakatnya masih hidup rukun dalam komunitas yang didominasi oleh etnik Toba. Munculnya politik identitas yang berdampak negatif di era reformasi, ternyata tidak mengusik ketenangan kota Balige. Justru menjadi ibukota Kabupaten Toba Samosir setelah dimekarkan tahun 1999 dan tetap harmonisnya hubungan antara umat Kristen dengan umat Islam.

Eratnya hubungan antara penganut agama di Balige sangat dipengaruhi oleh historis dan tradisi. Daerah Toba merupakan persinggahan awal dua agama besar yakni Islam dan Kristen. Agama Islam terlebih dahulu masuk ke daerah ini yang dibawa oleh pedagang dari Barus, ekspansi kaum Padri. Setelah kolonialisme, Kristen kemudian berkembang melalui misionaris-misionaris Jerman dan Belanda sendiri (Castels, 2002: 6)

Sistem *Dalihan Na Tolu* juga berlaku terhadap orang lain yang berbeda agama, apakah berposisi *horu*, *hulahula* atau *dongan tubu*. Dalam pada itu nilai yang dipegang masyarakat Batak Toba, menurut Harahap lebih didominasi ketentuan adat ketimbang ajaran agama. Kerena itu tidak berlebihan kalau adat lebih banyak mempengaruhi agama terutama *Dalihan Na Tolu*.

Model perkawinan *Connibium Asmetris* (perkawinan satu arah) dan Eksogami yang berlaku pada orang Toba serta tingginya kompetisi merupakan penyebab mereka banyak bermigrasi kedaerah lain disamping untuk meraih *Hasangapon* (kehormatan), *hamoraon* (kekayaan) dan *harajaon* (kekuasaan) (Irianto, 2002: 111). Migrasi tersebut turut andil dalam keluesan pandangan keagamaan. Sebab dengan merantau akan bersentuhan dengan budaya lain, atau agama Islam yang mayoritas. Tak pelak banyak orang Toba yang kemudian kawin dengan perempuan beragama Islam, atau mereka masuk Islam bahkan perempuan menjadi Kristen.

Penghormatan terhadap kerabat yang berbeda agama akhirnya membuat penghormatan terhadap agama lain di luar agamanya. Orang Toba yang beragama Islam juga tetap dipengaruhi adat yang berlaku secara turun temurun dan menganggap agama yang lain sebagai saudara. Sebab kerabat dekatnya banyak yang memeluk agama lain.

Kehidupan antar umat beragama di Balige ditandai dengan kebiasaan melakukan kerja sama yang baik sesamanya. Harahap (SIB, 2003) menyebutkan bahwa ada beberapa kegiatan yang sifatnya keagamaan tetapi dilaksanakan atau dihadiri, didukung secara bersama. Seperti halnya upacara kematian, kelahiran yang dilaksanakan kelompok agama tertentu. Bantuan untuk kegiatan agama seperti Natal

dan Tahun Baru, Pawai Takbiran, sering didukung oleh pemeluk agama yang berbeda. Seperti halnya dalam pesta yang dilakukan orang beragama Kristen, selalu disediakan orang yang mengurus keperluan bagi yang beragama Islam terutama dalam hal makanan, yang disebut *Parsubang*.

Demikian halnya dengan penguasaan beberapa sumber ekonomi yang cenderung diperebutkan dan menjadi pemicu konflik agama. Menurut Nasution, (1995: 266) hal seperti itu sering terjadi. Namun di Balige, ada dua sektor dimana orang muslim dominan di dalamnya yaitu usaha rumah makan dan pedagang emas. Bagi masyarakat, kedua hal itu tidak mempengaruhi hubungan sesama mereka. Padahal suatu kelompok cenderung melakukan kekerasan ketika identitas kelompok dan sumber ekonomi terancam (Depag RI, 2003: 56)

Kerukunan tersebut tidak disebabkan komparasi yang tidak seimbang antara penganut Kristen yang mayoritas dengan Katolik dan Islam yang minoritas. Muzhar (Depag RI, 2003: 2-3) menyebutkan kerukunan tidak hanya disebabkan dominasi mayoritas atas minoritas (*Coersion*), tetapi juga dikarenakan faktor konsensus. Konsensus tersebut menurut hemat kami telah membudaya, menjadi faktor strategis terciptanya keselarasan antar pemeluk agama, dimana pranata *Dalihan Na Tolu* memegang peranan kunci disamping faktor migrasi, atau ajaran agama itu sendiri, serta institusi pemerintah yang membidangi masalah keagamaan. Karena itulah maka budaya masyarakat secara fenomenologis menentukan warna tersendiri dalam bentuk dan perilaku sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan (Depag RI, 2003: 87). Dengan demikian kerukunan beragama bukan merupakan barang jadi dan ditentukan sepenuhnya oleh ajaran agama, namun dipengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, politik dan budaya (Muhaimin, 2003: v)

Keunikan diatas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, sejauh mana peran pranata *Dalihan Na Tolu* dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Balige? Dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Se jauh mana pranata *Dalihan Na Tolu* sebagai *way of life* berperan dalam menciptakan keseimbangan hubungan antar pemeluk agama.
- b. Se jauh mana kontribusi sistem kekerabatan terhadap rasa saling menghargai dalam menjalankan ajaran agama masing-masing

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengungkapkan peranan *Dalihan Na Tolu* dalam menciptakan keharmonisan hubungan antar umat beragama
- b. Untuk melihat kontribusi sistem kekerabatan terhadap rasa saling menghargai dalam menjalankan ajaran agama masing-masing

3. Tinjauan Teoritis

Studi ini membahas interaksi sosial masyarakat Balige dibidang kehidupan beragama. Kami melihat bahwa hingga saat sekarang di daerah ini tidak terdapat eskalasi intoleransi yang signifikan antar pemeluk agama. Hal ini dilatari kekonsistenan atas sistem kekerabatan yang menjadi *world view* dimana sistem tersebut telah mengatur pola hubungan sesama manusia dengan arif dan bijaksana. Disamping itu pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang lues mempunyai kontribusi besar terhadap keharmonisan tersebut.

Penelitian ini menggunakan perspektif teoritis yang mendekati persoalan di lokasi penelitian, yakni kota Balige dengan menggunakan konsep integrasi, sebagai dilakukan aliran Struktural-Fungsionalisme, Merton dan Parsons. Dimata penganut teori fungsionalis, masyarakat adalah suatu sistem yang stabil dari kelompok-kelompok yang bekerja sama, yang di dalamnya terdapat konsensus-konsensus. Lainnya sebuah tubuh, keduanya melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berkeseimbangan (*equilibrium*) (Veeger, 1986: 202).

Disamping itu perspektif tentang masyarakat tidaklah lengkap tanpa melihat sistem kekerabatannya. Karena itu kami juga akan melihatnya melalui teori yang dikemukakan oleh Levi-Strauss tentang hubungan manusia yang didominasi faktor kekerabatan. Penggunaan teori konflik sebagaimana dikemukakan oleh Merton dan Coser, juga relevan dalam menganalisa masyarakat Balige, sebab dalam beberapa aspek masyarakatnya tidak harmonis dan berada dalam keseimbangan terutama dalam konteks adat, kehidupan intern umat beragama.

Menurut Isaac (2000: 57), untuk memahami suatu identitas masyarakat perlu mempelajari bentuk-bentuk interaksi dari individu itu, kelompok dan politiknya yang lebih luas pada zaman dan tempatnya lebih dari itu harus belajar tentang sifat pengalaman kontemporer mereka.

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antar perorangan, antar kelompok dan antar perorangan dengan kelompok. Dalam hubungan sosial itu terjadi hubungan yang saling mempengaruhi, mengubah, memperbaiki kelakuan diantara individu dan kelompok.

Parsons telah menganalisis masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Inti dari sistem adalah hubungan antara bagian-bagian yang membentuk satu keseluruhan yaitu berupa organisme sosial. Karena organisme sosial suatu sistem, maka bagian-bagiannya berusaha untuk menetralsir gangguan-gangguan atau mempertahankan keseimbangan, Depag RI, (2003: 78).

Lebih lanjut menurut Parsons, bahwa bagian-bagian yang membentuk satu sistem, saling bergantung, interdependensi mencirikan tiap-tiap sistem. Di dalamnya tidak ada unsur yang sama sekali terpisah satu dari yang lain. Perubahan dalam unsur yang satu mempengaruhi unsur-unsur yang lain. Semua unsur saling membutuhkan. Interdependensi ini mengarah kepada keseimbangan sebagai tujuannya, sedangkan keseimbangan itu cenderung untuk mempertahankan dirinya (Capps, 1995: 178). Keseimbangan adalah konsep keteraturan berdasarkan kondisi khusus seperti diterapkan pada keadaan internal sebuah sistem empiris dalam hubungan dengan lingkungannya. Keteraturan itu tidaklah terpola secara kaku atau tanpa dapat dirubah. (Lauer, 2001: 113)

Parsons dalam Veeger, (1986: 199) menyebutkan bahwa keteraturan masyarakat disebabkan oleh adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama, dilembagakan menjadi norma-norma sosial dan dibatinkan oleh individu-individu menjadi motivasi-motivasi. Parsons juga menyebutkan ada empat masalah yang perlu ditanggulangi setiap sistem sosial agar tidak lenyap, proses jalannya tiap-tiap sistem sosial tergantung dari empat imperatif atau masalah yang harus ditanggulangi secara memadai supaya keseimbangan sistem itu dijamin, yaitu: adaptasi, kemungkinan mencapai tujuannya, integrasi anggota-anggotanya dan kemampuan

mempertahankan identitasnya terhadap kegoncangan dan ketegangan yang timbul dari dalam. (Lauer, 2001: 109), (Poloma, 2000: 26, 180) dan (Veeger, 1986: 207).

Unit terkecil sistem sosial menurut Parsons adalah *peranan*, sedangkan pola interaksi dalam sistem sosial bersifat normatif, artinya pola interaksi itu secara kultural ditetapkan sebagai pola yang tepat dan benar atau tidak tepat. Batas-batas sebuah sistem dipertahankan sejauh sistem itu tetap terintegrasi melalui nilai-nilai bersama. Struktur-struktur sosial menentukan peranan-peranan dan pola-pola perilaku yang tetap. Ketunggalan individu melenyap dibalik peranan-peranan yang telah dilembagakan oleh masyarakat. Pelembagaan itu diadakan demi suatu kesatupaduan (integrasi) dan orde masyarakat. Peranan-peranan resmi itu dipakai sebagai mekanisme yang mengintegrasikan orang kedalam kesatuan sosial. (Veeger, 1986: 201).

Berbeda dengan Parsons, Coser dalam Veeger, (1986: 207) menyatakan disamping keseimbangan dalam masyarakat terdapat juga konflik yaitu perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Menurutnya konflik selalu ada ditempat orang hidup bersama. Namun konflik menjadi unsur interaksi yang penting, dan sama sekali tidak boleh dikatakan merugikan, justru menjadi penyumbang yang banyak kepada kelestarian kelompok dan mempererat hubungan anggotanya.

Kecaman yang lebih halus terhadap teori Parsons dilakukan oleh Merton. Menurut Merton masyarakat yang terintegrasi secara sempurna hendaklah dibatasi

konteksnya karena hal itu sangat bertentangan dengan fakta. Hal yang terpenting menurutnya disfungsi tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif. (Poloma, 2000: 36). Sebagaimana disebutkan konflik yang terjadi dalam masyarakat terkadang mengambil bentuk non realistis. Bruner (dalam Ihromi, 2002: 161) menyebutkan dalam beberapa daerah di Tapanuli terjadi ketegangan dalam masyarakat tetapi diwujudkan dengan cara yang mistis, atau memberi racun kepada orang yang tidak disenanginya. Karena itu dalam studi ini perlu kita batasi bahwa perspektif yang akan kita soroti adalah dalam kehidupan realitas masyarakat. Sebab pembahasan tentang kebiasaan-kebiasaan yang non realistis telah ditekuni disiplin ilmu yang lain.

Sementara pandangan yang lebih komprehensif tentang masyarakat harus dilakukan tidak hanya dalam perspektif sistem dan integrasi. Menurut Dahrendrof dalam Veeger (1986: 212) tidak mungkin dapat memahami suatu masyarakat tanpa memperhatikan konsep-konsep integrasi, *equilibrium*, stabilitas dan disamping prasyarat-prasyarat fungsional lainnya, stabilitas dan perubahan, konflik, fungsi budaya, daya motivasi, konsensus dan paksaan.

Karena itu menurut Dahrendrof teori sistem dan integrasi harus dibentuk berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Masyarakat merupakan struktur yang terdiri dari unsur-unsur yang relatif kuat dan mantap
2. Masyarakat merupakan struktur yang unsur-unsurnya berintegrasi satu sama lain
3. Tiap unsur masyarakat mempunyai fungsinya dalam kelestarian sistem
4. Tiap-tiap struktur sosial yang fungsional dialas oleh suatu kesesuaian paham (*consensus*) antara anggotanya mengenai nilai-nilai tertentu

Senada dengan Dahrendorf, Berghe dalam Lauer, (2001: 104), mengemukakan masyarakat harus dianalisis secara keseluruhan sehingga mampu dilihat dalam berbagai dimensi. Ia mengemukakan ada tujuh ciri umum perspektif tentang masyarakat antara lain : *pertama*, Masyarakat harus dianalisis selaku keseluruhan, selaku sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. *Kedua*, Hubungan sebab akibat bersifat jamak dan timbal balik. *Ketiga*, sistem sosial senantiasa berada dalam keseimbangan dinamis. *Keempat*, Integrasi sempurna tidak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan namun cenderung dinetralisir melalui institusionalisasi. *Kelima*, perubahan berjalan lambat. *Keenam*, Perubahan adalah hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi di luar sistem. *Ketujuh*, Masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama.

Terjadinya interaksi sosial yang saling mempengaruhi antara anggota dan antar kelompok dalam masyarakat didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma yang diyakini oleh masyarakat itu. Nilai atau norma yang dianut masyarakat sebagian bersumber dari ajaran agama yang dipercayainya dan adat istiadat yang berlaku dalam kelompoknya. Agama dan tradisi dapat dilihat sebagai faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial yang dilakukan antara sesama pemeluk dan antar kelompok pemeluk agama.

Parsons dalam Fadhil, (2000: 108) menyebutkan bahwa tindakan sosial memiliki seperangkat kondisi yang diluar kontrol setiap individu. Tetapi masih dalam penguasaan manusia. Ia menyimpulkan bahwa agama merupakan unsur integral dari tindakan sosial dan aktivitas masyarakat selamanya bersifat multidimensional, hingga akses intelektual ke dalamnya membutuhkan penggunaan beberapa sistem analisis dan pengukuran.

Emile Durkheim dalam Koentjaraningrat, (1987: 87) dan dalam Veeger, (1986: 160) menjelaskan dalam berfikir dan bertindak laku manusia dihadapkan pada gejala-gejala atau fakta sosial yang seolah-olah sudah ada diluar diri para individu yang menjadi warga masyarakat. Fakta-fakta sosial itu merupakan entitas sosial yang berdiri sendiri, lepas dari fakta-fakta individu, malahan mempunyai kekuatan memaksa para individu untuk berpikir menurut garis-garis dan bertindak menurut cara-cara tertentu.

Apabila suatu fakta sosial sudah mantap, ia hidup sebagai entitas sendiri diluar diri para individu, dan tetap tidak berubah walaupun individu-individu yang mula-mula menciptakannya dan kemudian mengikutinya dan akhirnya mati, diganti oleh suatu angkatan individu-individu warga masyarakat yang baru, yang tetap akan mengikuti dan menyesuaikan diri terhadapnya.

Dengan berbagai pendapat tersebut di atas kami lebih menggunakan teori Parsons sebagai tokoh penting aliran Struktural-Fungsionalisme, yakni peranan sistem yang telah dilembagakan bersama secara konsensus untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang seimbang dan harmonis.

3.1 Kerukunan Umat Beragama

Ali (Depag RI, 2003: 52) menyebutkan dalam kehidupan masyarakat tradisional hubungan antara agama dan budaya lokal sangat akrab. Antara keduanya terjadi jalinan saling mengisi satu sama lain dan terasa sangat sulit membuat pemisahan. Sehingga sangat logis kalau terjadi hubungan simbolik antara ajaran agama dan adat istiadat setempat. Seorang figure tokoh agama, banyak yang sekaligus juga berperan dan diakui selaku tokoh adat yang disegani

Namun dengan perkembangan jumlah penduduk disertai perubahan pesat dan mobilitas sosial yang tidak mungkin dibendung dari waktu ke waktu akibat inovasi super canggih dibidang iptek, transportasi, sementara luas wilayah tidak berkembang, maka perjumpaan antara berbagai pemeluk agama dan tukar menukar aspirasi keagamaan merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Komunitas agama dan budaya yang semula dirasakan homogen dan monolitik, sekarang menjadi semakin plural. Di wilayah yang sama dan karakter kemanusiaan yang sama, tumbuh dan berkembang beragam budaya, bahasa, keyakinan dan ekspresi keagamaan

Pertemuan antar kebudayaan daerah atau suku bangsa di Indonesia pada umumnya terjadi karena adanya kontak langsung antara para pendukung kebudayaan. Pertemuan antara kebudayaan setempat dengan kebudayaan dari luar terjadi oleh karena pendukung kebudayaan luar itu datang dan bertempat tinggal bersama dengan kebudayaan setempat.

Bruner (dalam Ihromi, 2000: 166) menyebutkan kota Balige sangat homogen dari segi etnis dan agama. Ia hanya menemukan sedikit orang China dan Jawa didaerah ini. Setelah berselang lama, kini daerah tersebut telah semakin plural dengan bertambahnya jumlah penduduk dari berbagai daerah etnik dan agama yang dianut. Dari segi etnis Balige telah dihuni tidak hanya orang Batak Toba tetapi bermukim di dalamnya orang Simalungun, Mandailing, Minang, Jawa, Nias dan China. Sedang pemeluk agama juga terdapat kemajemukan, sebab pemeluk Agama Kristen, Katolik, Islam, Budha dan Parmalim terdapat dikota tersebut.

Bangsa Indonesia sejak lama disadari memiliki potensi rawan konflik yang besar karena kemajemukan. Heterogenitas yang dimiliki mudah untuk dieksploitasi menjadi sumber konflik seperti halnya kesuksesan Belanda untuk kepentingan kolonialismenya dengan melakukan politik *divide et impera*. Begitu beranekanya ras, suku dan agama yang ada tentu membuat rawan konflik horizontal. Sementara begitu banyak kepentingan yang harus diurus secara melembaga menyangkut kepentingan seluruh masyarakat menyebabkan konflik vertikal tak kurang banyaknya.

Madjid (1992: 177), menyatakan bangsa Indonesia adalah sebuah masyarakat plural, disebabkan hampir semua agama terwakili dikawasan ini. Disamping itu masyarakat kita mempunyai kadar toleransi yang tinggi sehingga unik ditengah bangsa-bangsa di dunia. Namun beliau tidak setuju bahwa Pancasila acapkali disebut sebagai salah satu bahan dasar untuk itu. Menurutnya diperlukan pengertian akan permasalahannya secara lebih substantif yang tidak hanya berhenti pada jargon-jargon sosio-politis semata.

Syahid (2003: 37) berpendapat bahwa kerukunan dan ketidakrukunan bukanlah sebuah keadaan yang tercipta dengan sendirinya, atau sebuah variabel yang berdiri sendiri. Kerukunan atau sebaliknya selalu terkait dengan berbagai faktor yang melatarinya. Baik faktor sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan agama itu sendiri. Masalah inti agama adalah berkaitan dengan sesuatu yang masih samar dan tidak dapat diraba, yang realitas empirisnya sama sekali belum jelas, karena menyangkut dengan dunia luar (*the beyond*), hubungan manusia dengan dunia luar itu dan implikasi praktisnya terhadap kehidupan manusia. O'dea (1994: 1)

Problema hubungan antar umat beragama terletak pada keyakinan setiap penganut agama yang meyakini kebenaran mutlak dan universal atas ajaran agamanya yang berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk kehidupan dunia akhirat (Coward, 89: 49). Agama juga diyakini menjadi penyelamat kehidupan di dunia dan alam selanjutnya (Nasution, 1995: 266), oleh sebab itu setiap orang merasa bertanggung jawab penuh untuk menyebarkan ajaran tersebut kepada orang lain supaya diakui oleh seluruh manusia. Apabila keyakinan individu dihadapkan pada keyakinan individu dalam kelompok lain, maka akan melahirkan potensi-potensi konflik yang sulit diselesaikan.

Sementara itu Hendropuspito (1990: 62) menyebutkan supaya agama dapat melaksanakan fungsi sosialnya, manusia harus mempunyai keyakinan akan kebenaran, kemanjurannya dan kekuatannya, tiap kelompok menggunakan bentuk pbenarannya sendiri-sendiri bagi kepercayaan dan ibadahnya, dan mereka menggunakan berbagai cara untuk menghubungkan dengan yang ghaib.

Selanjutnya menurut Nasution (1995: 266) perasaan dan keyakinan melahirkan dogma-dogma yang kebenarannya tidak dapat diganggu gugat, sungguhpun dogma-dogma itu terkadang bertentangan dengan rasio. Ajaran-ajaran yang dibawa satu agama oleh pemeluknya dipandang sebagai kebenaran mutlak. Ajaran-ajaran agama lain dipandang salah dan tidak bisa ditolerir. Keyakinan seperti itu dapat menimbulkan intoleransi dalam hidup beragama, karena ia menganggap hanya dirinya yang benar dan harus disampaikan kepada orang lain sementara yang lain salah dan tidak akan memperoleh keselamatan.

Timbulah usaha-usaha untuk menyelamatkan sesama manusia, menunjukkan kesalahan agama lain sambil menyatakan kebenaran agamanya sendiri

Usaha-usaha serupa ini, yang pada mulanya didasari niat baik bisa menimbulkan tegangnya hubungan antara kedua pemeluk agama karena yang lain akan menyatakan bahwa agamanya juga adalah benar dan perlu disampaikan kepada orang lain sehingga bisa menimbulkan konflik.

Meskipun agama menghendaki untuk menyebarkan ajarannya namun disisi lain setiap agama tentunya menyebarkan pesan-pesan toleransi. Menurut Efendy (2001: 7), agama selalu disertai muka dua (*double face*), pada satu sisi secara inherent agama memiliki identitas yang bersifat eksklusif, *particularist* dan *primordial* akan tetapi pada waktu yang sama agama juga kaya akan identitas yang bersifat inklusif, universal dan transendental. Karena itu perlu memahami posisi agama dan meletakkannya dalam situasi yang lebih riil yakni agama secara empirik dihubungkan dengan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.

Sirait dalam Simatupang (2002: 256) menjelaskan agama sebagai sub sistem budaya sangat berkaitan dengan kehidupan abadi (*eternity*), maka nilai agama ini harus menyinari dan menggarani sub sistem nilai yang lain. Karena itu nilai agama merupakan unsur yang sangat penting di dalam mencapai perdamaian dan kerukunan beragama. Nilai agama ini yang ditampung di dalam nilai bersama (*common values*) di dalam pengamalan pluralisme.

Hendropuspito (1990: 29) menyebutkan bahwa aliran fungsionalisme memandang bahwa agama sebagai suatu institusi yang lain, yang mengemban tugas agar masyarakat berfungsi dengan baik, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun mondial. Maka dalam tinjauannya yang dipentingkan

adalah daya guna dan pengaruh agama terhadap masyarakat, sehingga eksistensi dan fungsi agama, cita-cita masyarakat dapat terwujud.

Notingham (2002: 27) berpendapat masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaannya sampai batas minimal, disamping itu agama berfungsi memenuhi sebagian diantara kebutuhan-kebutuhan itu, meskipun mungkin terdapat kontradiksi dan ketidakcocokan dalam cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut

Agama mempunyai peran yaitu *pertama*, agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi kewajiban-kewajiban sosial tersebut dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban sosial mereka. *Kedua*, agama juga memainkan peranan vital dalam memberikan kekuatan memaksa yang mendukung dan memperkuat adat istiadat. Dalam hubungan ini patut diketahui bahwa sikap mengagungkan dan rasa hormat, terutama yang berkaitan dengan perasaan-perasaan kagum yang ditimbulkan oleh rasa sakral itu sendiri (Notingham, 2002: 29).

Bagi Isaac (2000: 198 - 200) agama telah memberikan kepada anggota-anggotanya suatu ikatan yang kuat untuk kepercayaan tradisional yang dihayati bersama tentang eksistensi kebudayaan mereka. Agama kadang-kadang dapat menahan orang disatu tempat dan suatu waktu untuk tidak berbuat yang buruk karena dorongan niatnya, secara normal atau sebaliknya, suatu kemurahan atau pertolongan kecil yang semua orang harus berterima kasih. Selanjutnya Isaac berpendapat adalah merupakan cara yang normal dimana orang-orang

menghubungkan keterpisahan karena perbedaan mereka itu, dimana mereka itu berpegang oleh rasa keunikan dari kelompoknya sendiri.

3.2 Dalihan Na Tolu

Bangun dalam pengantar Buku Sinatupang (2002: 12) menjelaskan bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang majemuk, kemajemukan asal-usul, suku bangsa, budaya, dan agama. Dari semua jenis kemajemukan itu, kemajemukan budaya adalah salah satu yang mempunyai potensi sentral dalam menentukan pandangan, sikap, perilaku dan tindakan. Budaya adalah kerangka rujukan dari tindakan dan membentuk pandangan, sikap dan perilaku. Oleh karena itu pemahaman tentang definisi dan fungsi budaya sangat penting.

Levi-Strauss (dalam Poloma, 2000: 213) menyatakan bahwa dalam masyarakat bersahaja biasanya didominasi oleh sistem kekerabatan dan warga-warganya berinteraksi di dalamnya berdasarkan sistem simbolik yang menentukan sikap mereka terhadap paling sedikit tiga kelas kerabat, yaitu kerabat karena hubungan darah, karena hubungan kawin dan karena hubungan keturunan.

Suatu sistem budaya sering berupa pandangan hidup (*world view*) bagi manusia yang menganutnya. Pandangan hidup biasanya mengandung sebagian dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, yang dipilih secara selektif oleh para individu dan golongan-golongan dalam masyarakat.

Geertz dalam Fadhil (2000: 109) meyakini bahwa kultur adalah sebagai suatu sistem, agama merupakan bagian terpenting dari kultur. Jalur yang membuka akses kepada memahami agama adalah kultur.

Dalam membahas *Dalihan Na Tolu* dan Agama sebagai sistem tidak terlepas dari pemahaman konsep peranan. Koentjaraningrat (1987: 169) menyebutkan manusia yang melakukan tindakan interaksi biasanya menganggap dirinya berada dalam suatu kedudukan sosial tertentu yang juga dikonsepsikan untuknya oleh norma-norma yang menata seluruh tindakan tadi. Karena status maka para individu bertindak menurut norma-norma khusus dari pranata bersangkutan, tingkahlaku individu yang menentaskan suatu kedudukan tertentu disebut “peranan sosial”.

Penduduk Balige pada umumnya adalah orang Batak Toba yang mempunyai perangkat struktur dan sistem kekerabatan yang merupakan tradisi nenek moyang dan didasarkan pada marga. Dikalangan orang Batak dikenal istilah *dongan tubu* atau *dongan sabutuha* yaitu saudara se keturunan dari pihak ayah. Didasarkan pada perkawinan, pemberi istri disebut *hulahula*, pihak pengambil dinamakan *boru*. Ketiga perangkat ini dikenal dengan istilah *Dalihan Na Tolu* (Irianto, 2002: 110).

Secara struktural, *Dalihan Na Tolu* diartikan sebagai tungku yang tiga, tempat memasak yang dipakai masyarakat Batak dahulu, terbuat dari batu atau tanah bata. Biasanya periuk atau yang sejenisnya diletakkan di atas tungku tersebut untuk memasak setelah api dinyalakan di antara tiga tungku tersebut. *Dalihan Na Tolu* secara fungsional mempunyai peranan penting bagi masyarakat Batak terutama berhubungan dengan urusan masakan. Lebih dari itu secara simbolik *Dalihan Na Tolu* merupakan adalah tumpuan dan menjadi sistem yang mampu mengatur hubungan masyarakat secara baik sehingga kerukunan di antara komponennya berjalan dengan harmonis.

Berdasarkan pranata *Dalihan Na Tolu*, suatu kelompok yang memberikan anak perempuannya dianggap memiliki status yang lebih tinggi daripada kelompok yang menerima anak perempuan itu. Namun hubungan ini sifatnya relasional dan sarat dengan simbol dan makna. Diwaktu yang lain kelompok *hulahula* akan berubah menjadi *boru* terhadap kelompok yang lain, ketika anak yang mereka kawinkan adalah anak laki-laki. Begitu juga dengan *boru* akan berubah menjadi *hulahula* terhadap kelompok lain apabila yang mereka kawinkan adalah anak perempuan.

Menurut Sihotang dan Sibarani (tt: 8) *Dalihan Na Tolu* adalah sendi yang paling pokok dari kehidupan orang Batak. Tidak satupun kegiatan orang Batak yang dapat lepas dari sendi ini, kecuali bagi mereka yang sama sekali sudah melepaskan diri dari ikatan ini. Hal sama juga disebutkan oleh Sihombing (1986: 87), bahwa melestarikan *Dalihan Na Tolu* adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang Batak, karena hilangnya sistem ini berarti hilangnya budaya Batak. Sebab *Dalihan Na Tolu* adalah dasar falsafah hidup orang Batak dan menjadi pondasi susunan masyarakat. Adanya aturan dan sanksi yang telah menjadi konsensus leluhur tentang pranata *Dalihan Na Tolu*, memungkinkan tercapainya kohesi masyarakat dan kelanjutan kebudayaan.

Karena itu menurut Sihombing (1986: 71) *Dalihan Na Tolu* membentuk kesatuan tritunggal dalam kehidupan orang Batak. Dan Hubungan kekerabatan seperti ini mendidik orang Toba untuk menjadi orang yang demokratis dan terbuka. Pola hubungan antar manusia seperti ini terbawa dalam pergaulan orang Toba dengan suku bangsa non-Batak Toba (Harahap, 1987: 145). Sebab kelompok yang tidak termasuk kedalam etnik Batak tetap mendapat tempat

dalam struktur masyarakatnya yaitu disebut dengan *Sihalsihal* atau *Aleale*. Mereka ini mempunyai kedudukan yang istimewa seperti penopang dalam tungku apabila tungkunya tidak rata. (Rajamarpodang, 1992: 52). Karena itu kedudukan *sihalsihal* tersebut bisa sebagai *Hulahula*, terkadang menjadi *Dongan Tubu*, atau pada kesempatan lain bisa sebagai *Boru*, tergantung pada elemen mana yang membutuhkannya.

Dalihan Na Tolu telah menopang masyarakat Batak dengan sempurna serta dalam keseimbangan yang benar-benar ideal, hal itu pula yang membuat api solidaritas tetap menyala dan semangat gotong royong tetap ketat. Bagi orang Batak sekali *dongan sabutuha* tetap *dongan sabutuha* karena tidak bisa pindah marga sehingga ada umpasa “*tampulon aek do na mardongan sabutuha*” walaupun ada perselisihan akan dengan cepat baik kembali.

Harahap dalam pengantar buku Castels (2002: xix) menyebutkan nilai kekerabatan pada orang Batak umumnya termasuk yang tinggi kadarnya, pertanyaan pertama diantara orang Tapanuli ketika berkenalan adalah tentang marga, dengan mengetahui marga mereka langsung mengetahui pula posisinya dalam hubungan kekerabatan dan *Dalihan Na Tolu*. Dengan itu mereka mengetahui adat yang bagaimana yang diterapkan dalam pembicaraan dan pergaulan. Selanjutnya sebagai sesama anggota kerabat *Dalihan Na Tolu*. Tradisi martutur atau martarombo menjadi nilai budaya yang melestarikan semangat primordialisme.

Sementara itu Simatupang (2002: 37, 169), berpendapat budaya mengacu kepada warisan masyarakat, yaitu semua pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan, keterampilan yang tersedia bagi anggota masyarakat. Warisan

masyarakat tersebut merupakan produk sejarah yang spesifik dan unik. Budaya merupakan pandangan hidup (*way of life*) yang khas dari sekelompok orang, desain yang lengkap tentang hidup mereka.

Budaya bagi anggota masyarakat yang bersangkutan, berfungsi sebagai alat pengikat karena dia dapat berpartisipasi secara penuh bersama-sama dengan anggota-anggota lain di dalamnya, jadi budaya sifatnya inklusif, penuh makna, walaupun tidak disadarinya, karena dia sering menerimanya sebagai sesuatu yang biasa, lumrah dan semestinya demikian (*taken for granted*).

Harahap (1987: 143), menyebutkan sistem kekerabatan pada orang Batak telah disosialisasikan kepada anak sejak dia mulai mengenal lingkungannya yang paling dekat, yaitu tokoh-tokoh yang paling dekat dalam kehidupannya terutama ibu, ayah dan saudara-saudaranya. Orang lain di luar dirinya secara perlahan diperkenalkan sesuai dengan sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. Bersamaan dengan perkenalan orang-orang lain itu diperkenalkan kepadanya marga dan nilai yang terkandung didalam pengertian marga lengkap dengan kode etik *Dalihan Na Tolu*. Diperkenalkan pula kepadanya silsilah keluarga batih, *hulahula*, *boru*, dan marga Batak pada umumnya. Termasuk dalam proses sosialisasi awal ialah perkenalan *martutur* panggilan kekerabatan yang lengkap dengan kata-kata kunci yang terdapat dalam perbendaharaan hubungan kekerabatan berdasarkan *Dalihan Na Tolu* mengajarkan solidaritas dan penghargaan kepada orang lain

Karena itu kebiasaan *martarombo* (menanya marga) sudah menjadi ciri khas orang Batak apabila pertama kali bertemu. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan kekerabatan sesama mereka. Lebih dari itu untuk

menentukan sikap dan tingkah laku. Banyak penulis yang sudah mengungkapkan hal tersebut dalam karya-karya mereka. Antara lain : Siahaan (1982: 45), Sibeth (1991: 54), Bruner dalam Ihromi (2000: 165), Jailani dan Sadar (tt: 8), Castels (2002: 7).

Harahap (1987: 63 - 65) menyebutkan untuk memahami tradisi kebudayaan adalah melalui konsepsi metafisik yang mempertahankan keyakinannya mengenai tradisi yang diwahyukan secara hirarkis melalui proses yang bersifat mistis. Dengan konsep ini dapat dipakai untuk memahami pandangan tradisional tentang *the unity* (kesatuan).

Masyarakat Batak adalah masyarakat kosmopolit dan totalis dimana mereka menganggap bahwa *Dalihan Na Tolu* merupakan akhir dari totalitas dari debata. Pandangan mereka antara kosmologi dengan realitas sangat erat sehingga hubungan agama tradisional sangat dekat dengan tradisi khususnya tentang eksistensi manusia. Dengan demikian *Dalihan Na Tolu* tidak dapat dipandang secara terpisah dari masing-masing unsur yang membentuknya. Oleh karena itu Konsep *Dalihan Na Tolu* sebagai kebudayaan tidak terlepas dari keteraturan dan keseimbangan makrokosmos yakni keberadaan tiga debata. Keteraturan makrokosmos harus juga diikuti mikrokosmos.

Teori modernisasi yang menyebutkan semakin tergilasnya tradisi yang bersahaja di era kontemporer tampaknya tidak berlaku pada orang Batak. Simanjuntak (2002) menyebutkan semakin tinggi pendidikan dan kedudukan orang Batak ia bukan semakin jauh dari adat, tetapi sebaliknya malah semakin intens terlibat dalam kegiatan warisan leluhur tersebut. Mereka ditempatkan sebagai tokoh, ketua atau setidaknya penasehat organisasi primordial.

Senada dengan pendapat Harahap diatas, Bruner (dalam Ihromi, 2000: 167) menyebutkan bahwa orang Batak adalah suku yang sadar akan kemajemukan manusia, mereka tidak mempertentangkan antara dia dengan yang lain, memperlakukan orang lain sama dengan kelompoknya ketika sudah memasuki tempat tinggal mereka. Disamping itu pengaruh migrasi terhadap budaya lokal sangat besar karena telah bersentuhan dengan etnis dan budaya orang lain.

Simatupang (2002: 182) meyakini bahwa selama orang Batak masih dapat berperan dalam masyarakat Indonesia dan tidak mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat Batak tidak akan membentuk primordialisme yang keras, eksklusif dan separatis. Dan tidak pula orang Batak memisahkan diri dari masyarakat Indonesia yang pluralis. Dalam mengembangkan budayanya agar dapat memenuhi tuntutan budaya bangsa Indonesia yang supraetnis mereka akan selalu mencari keseimbangan diantara kebatakannya dan keindonesiaannya.

Sampai abad 19 pengaruh Islam sangat kecil di Batak Toba walaupun agama ini masuk ke daerah tersebut jauh sebelumnya, dan hingga saat ini jumlah penganut agama Kristen adalah mayoritas di Balige, sedang Islam menjadi minoritas. Castels (2002: 72 - 78) menyebutkan walaupun ada pertentangan Islam dengan Kristen di Pahae, Singkel, Pangaribuan pada masa penjajahan lebih disebabkan kebijakan Kolonial 1889 yang melarang penyebaran Islam dan melindungi Kristen untuk kepentingan kolonialismenya. Kendati ada tekanan Belanda, namun rakyat tetap melakukan kerja sama antara Sarekat Islam dengan Huria Kristen Batak tahun 1917 dalam pemilihan harajaon di Janji Angkola.

Orang Toba pemeluk agama Kristen tidaklah sepenuhnya menjadi Kristen sebagaimana orang Mandailing, mereka tetap mengamalkan ajaran-ajaran adat istiadat orang Batak Toba. Kebatakannya tetap kuat bahkan terkadang bisa lebih kuat dibandingkan ke-Kristenannya. Sebagai contoh *Hulahula* dianggap *Debata Na Tarida* (Tuhan yang nampak) yang berhak memberkati (*Pasupasu*). Dengan kata lain orang Toba Kristen tetap menjadi orang Batak sejati, sehingga tidak jarang urusan gereja menjadi tersisih karena kepentingan adat yang mendesak (Harahap dalam Castels, 2002: xix). Batak sejati berarti tetap berpegang kepada *Dalihan Na Tolu* tanpa melihat latar belakang agama.

Simanjuntak dan Harahap meyakini frekwensi konflik dan uhum pada orang Toba cukup menonjol. Sosialisasi konflik telah berlangsung sejak dini. Bayi-bayi orang Toba langsung berada dalam lingkungan konflik sehingga terbiasa mendengar, melihat dan terlibat dalam konflik keluarga. Pemicu konflik karena *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (panjang umur), *hasangapon* (kehormatan). Sedikit konflik yang didasari nilai-nilai budaya yang lain.

Penelitian tentang etnik dan kehidupan masyarakat Batak sebenarnya telah banyak dilakukan oleh penulis dari Indonesia maupun mancanegara. Rentang waktu kajian tersebut sudah berlangsung lama bahkan sejak terjadinya kolonialisme di negeri ini. Pada umumnya fokus pembahasan lebih banyak ditujukan pada tradisi (Siahaan, 1982, Sihombing, 1986), kehidupan sosial kemasyarakatan (Sibeth, 1991, Simanjuntak, 2002), kehidupan politik (Castels, 2002), hukum dan perkawinan (Saragih dkk, 1980) Irianto, 2002), adat dan religiusitas (Vergowen, 1986, Sihotang, Pardede, 2003), aktualisasi falsafah *Dalihan Na Tolu* dalam kehidupan

(Rajamarpodang, 1992, Harahap dan Siahaan, 1987, Sinuhaji dkk, 1998), Sejarah kepatriotan (Sibarani). Namun demikian sampai saat ini tidak ditemukan penelitian tentang peranan *Dalihan Na Tolu* terhadap hubungan antar pemeluk agama di daerah Batak. Dengan demikian langkah ini merupakan hal baru dari dialektika perkembangan ilmu Antropologi Agama, tentunya dengan menggunakan paradigma yang telah ada dari referensi sebelumnya.

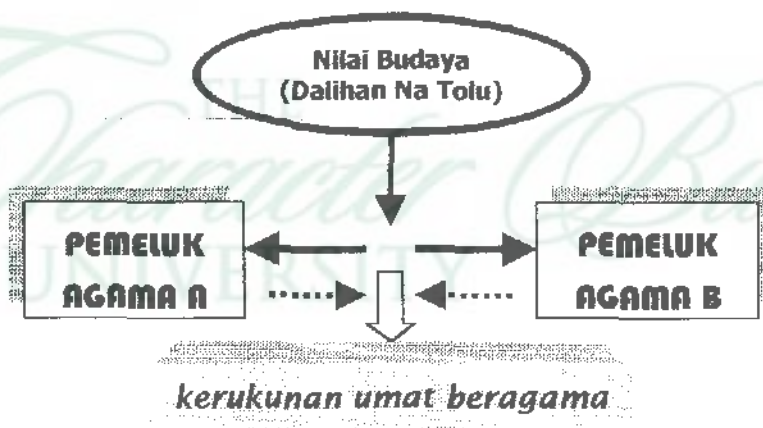
Dengan teori-teori yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh diatas, maka kami berpendapat bahwa apabila nilai-nilai dalam suatu masyarakat dapat diintegrasikan dalam suatu tatanan atau sistem yang berarti pada saat itulah anggota masyarakat dapat bersatu menuju kesatu arah dalam tingkah laku mereka. Kemudian agama dan adat telah menjadi sistem sosial suatu masyarakat yang mempunyai kekuatan tersendiri dalam kehidupan mereka. Karena itu agama dan adat tersebut sekaligus menjadi pranata yang melekat dan merupakan bagian integral dari kehidupan suatu masyarakat.

Dalam melihat kontinuitas kerukunan antar beragama yang terjadi di Balige kami berpendapat bahwa teori konsensus dari Parsons sangat relevan dalam menganalisa kondisi tersebut. Meskipun ada teori lain yang dapat digunakan dalam menganalisa masyarakat yakni teori pemaksaan (*coersion*) antara mayoritas dengan minoritas. Muzhar (2003: 203) menyebutkan teori konsensus dimaksudkan bahwa suatu masyarakat manusia tetap bertahan karena para anggotanya bersepakat mengenai berbagai macam nilai dan sanksi. Akibat kesepakatan tersebut masyarakat dapat terpelihara keutuhannya karena selalu rukun dan tenteram serta dalam waktu yang sama terjadi pembagian tugas dan fungsi diantara sesama anggotanya untuk menopang tugas fungsi masyarakat.

Sedang dalam perspektif *coersion*, menganggap masyarakat bisa rukun karena adanya unsur *coersion* (pemaksaan) didalamnya, sehingga kelompok yang kuat memaksa kelompok yang lemah. Ketika pemaksaan itu diterima karena ketidakberdayaan pihak yang dipaksa dan hal itu berlangsung dalam jangka waktu tertentu, maka itulah yang disebut bahwa masyarakat sedang rukun.

Menurut hemat kami adanya sistem adat yang menjadi konsensus dalam masyarakat Batak disebabkan oleh adanya kekuatan primordial *Dalihan Na Tolu* sebagai mekanisme pengatur hubungan sesama masyarakat Batak dan etnik lain, atau diantara mereka yang berbeda agama. Adat istiadat dan sistem kekerabatan tersebut memberikan aturan-aturan bagi setiap elemen untuk menjadi masyarakat terbuka, kosmopolit serta tidak membedakan manusia karena suku, agama dan asal-usul. Namun status seserang hanya ditentukan oleh kedudukannya dalam pranata tersebut. Karena itu adanya kebhinnekaan yang memungkinkan mereka terikat dengan norma seperti keyakinan religius sebenarnya dapat dipersatukan dalam hubungan *Dalihan Na Tolu*. Dengan kerangka berfikir seperti di atas maka penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Berfikir Peranan *Dalihan Na Tolu* dalam Mewujudkan kerukunan umat beragama di Balige



4. Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Balige sekitarnya dengan terlebih dahulu melihat dan memahami fenomena yang ada di lapangan, sehingga menjadi pijakan dalam penelitian selanjutnya.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini direncanakan memakan waktu selama dua bulan mulai tanggal 25 Mei s/d 20 Juli 2004, dengan jadwal sebagai berikut:

WAKTU PENELITIAN

NO	Kegiatan Penelitian	Tahun 2004															Ket.					
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		4	1	2	3	4
1	Persiapan penyusunan proposal	X	x	x																		
2	Penyerahan rancangan proposal dan konsultasi pembimbing			x																		
3	Perbaiki proposal				x																	
4	Penyerahan proposal setelah perbaikan dan konsultasi pembimbing				x																	
5	Persetujuan proposal oleh pembimbing					x																
6	Seminar proposal						x															
7	Pelaksanaan penelitian lapangan						x	x	x	x	x											
8	Konsultasi berbagai perkembangan penelitian lapangan											x	x									
9	Analisa data dan penulisan laporan										x	x	x									
10	Konsultasi pembimbing serta penyelesaian penelitian tahap akhir												x	x								
11	Persiapan ujian akhir													x	x							
12	Penggandaan dan pelaporan hasil																x	x				

b. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*social field research*) yang dilaksanakan di Balige. Sesuai dengan sifat penelitian ini, sangat tergantung kepada data-data lapangan berkenaan dengan peranan *Dalihan Na Tolu* terhadap harmonisnya hubungan penganut antar umat beragama. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan terpilih (*purposive informan*) atau informan kunci (*key informan*) sesuai kebutuhan riset. Informan akan dipilih dari kalangan masyarakat terutama para penggiat kerukunan, tokoh-tokoh agama, adat dan pejabat pemerintah yang bidang tugasnya menangani hubungan kerukunan intern dan antar umat beragama. Mereka adalah pihak-pihak yang dianggap tahu, memahami betul persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

Informan kunci tersebut ditetapkan dengan teknik *snow ball sampling* (sampling bola salju). Yaitu suatu persoalan bisa semakin membesar dan melebar ketika dikonfirmasi kepada subyek penelitian yang lain. Keberhasilan teknik ini tergantung pada seberapa jauh peneliti menemukan dan atau mengidentifikasi siapa informan kunci tersebut, untuk selanjutnya tergantung kepada sejauh mana pengenalan dan kehangatan interaksi antara peneliti dengan informan. Untuk menentukan seberapa alokasi waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini digunakan konsep *maximum variation sampling to document unique variation* (sampling variasi maksimum ke dokumen variasi unik). Yakni peneliti akan menghentikan pengumpulan data apabila sudah tidak lagi ditemukan ragam temuan baru dari sumber data yang ada. Dengan demikian jumlah menjadi tidak terlalu penting, melainkan ketuntasan masalah.

Dalam rangka mendapatkan data yang lebih akuntabel, akan dilakukan pula studi dokumen dan eksperimen di lapangan untuk melihat fenomena yang sebenarnya. Disamping melakukan teknik dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap informan dan mengajukan ulang hasil yang diperoleh kepadanya. Data yang didapat akan dicek kepada pihak-pihak tertentu dengan maksud agar lebih banyak masukan-masukan yang konstruktif terhadap metode maupun keakuratan data. Cara lain ialah dengan melakukan observasi partisipasi baik secara langsung maupun dengan melaksanakan diskusi terarah.

Kegunaan diskusi tersebut agar mampu melakukan pengamatan yang lebih intensif sehingga dapat dijadikan dasar pijakan ke depan untuk pencarian data yang lebih otentik. Sebab seluruh informan telah dapat mengutarakan pendapatnya. Cara seperti ini dipandang lebih mempunyai keunggulan dalam hal obyektivitas, transparansi dan komprehensif.

Selain itu penelitian ini juga akan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam *Dalihan Na Tolu* secara khusus serta kajian historis masuk dan perkembangan agama Islam dan Kristen di wilayah Toba dengan maksud untuk memahami faktor-faktor apa yang memperkuat atau mungkin yang melemahkan toleransi beragama di daerah ini yang secara umum berjalan harmonis sejak dahulu hingga saat ini. Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap kondisi kehidupan beragama dan bagaimana hubungan antar umat beragama, dalam suatu masyarakat yang plural, dimana agama bukan satu-satunya kategori untuk menciptakan kerukunan dan ketidakerukunan. Dalam hal ini yang disoroti adalah mekanisme sistem *Dalihan Na Tolu* dalam menata kehidupan masyarakat Balige sehingga tetap harmonis.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Wawancara, cara ini dipakai untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari masyarakat yang diteliti mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Dalihan Na Tolu* dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan nyata masyarakat Balige, dikaitkan masalah sosial keagamaan yaitu hubungan diantara anggota masyarakat yang berlainan agama dan etnis. Teknik ini bermanfaat untuk mendiskusikan validitas data-data dengan sumber yang dipandang mengetahui dan mengenal dengan baik kondisi kerukunan di wilayah penelitian. Wawancara bisa dilakukan dengan para pemuka majelis agama dan tokoh adat atau dengan para penggiat kerukunan beragama, juga pejabat terkait di lingkungan Departemen Agama.
2. Teknik observasi, untuk mengamati secara langsung bentuk-bentuk toleransi beragama dan kerja sama sosial sesama mereka, sistem perkawinan maupun adat yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan lainnya. Teknik ini sangat membantu untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan intern dan antar umat beragama yang memiliki kontribusi positif terhadap kerukunan itu sendiri.
3. Studi dokumentasi, yaitu penelaahan terhadap data-data dokumentasi sangat penting dalam penelitian ini. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan data kontekstual berkenaan dengan rancangan strategis kerukunan beragama. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan-catatan, arsip, termasuk berbagai laporan penelitian sebelumnya yang kebetulan bersinggungan dengan masalah penelitian.

c. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data dilakukan pendekatan kualitatif maupun pendalaman terhadap data yang diperoleh. Sebab sudut pandang peneliti sangat terbatas dan tidak pasti sesuai dengan apa yang dipahami oleh masyarakat responden. Karena itu menurut Suparlan diperlukan kehati-hatian dalam pengumpulan dan menganalisa data dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif tidak bermain dengan angka-angka melainkan dengan data yang dikumpulkan yang berasal dari dan mengenai kegiatan-kegiatan manusia sebagai makhluk sosial dan budaya, sehingga dapat melibatkan hubungan perasaan dan emosional antara si peneliti dengan orang yang ditelitinya (Suparlan, 1986: 1).

Teknik analisa data yang dipakai dalam study ini adalah menggunakan analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan beberapa pertimbangan yaitu: *pertama*, teknik analisa kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, cara ini menyajikan secara langsung substansi hubungan antara peneliti dengan responden, sehingga dianggap lebih peka dan lebih adaptif dengan banyak pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Mocloeng, 2000: 189 – 193).

Terhadap data yang telah terkumpul peneliti akan melakukan kegiatan yaitu: *pertama*, mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan karakteristiknya yang bersumber dari berbagai catatan lapangan guna memudahkan peneliti membedakan data pokok dan data pendukung. *Kedua*, melakukan pengkategorian terhadap data. Lincoln dan Guba (1985: 347) menguraikan kategori sebagai berikut: (1) mengelompokkan kartu kedalam bagian isi yang secara jelas mempunyai kaitan. (2) penetapan inklusi setiap kategori yang dapat

digunakan untuk menetapkan keabsahan data. (3) mengharuskan setiap kategori dilaksanakan taat azas, artinya tidak direkayasa dan tumpang tindih dalam penerapannya. *Ketiga*, melakukan penafsiran data yakni sesuai dengan tujuan, prosedural penerapan dan pelaksanaan penelitian sehingga mampu memberikan jawaban atas masalah penelitian.

d. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian diarahkan pada seputar:

1. Apakah umat beragama rukun di Balige? Dan faktor penyebab kerukunan dan ketidakrukunan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kerukunan umat beragama beragama tersebut?
3. Bagaimana perspektif pendatang Islam?
4. Seperti apa mekanisme kerja *Dalihan Na Tolu* terhadap proses kerukunan umat beragama
5. Bagaimana peran lembaga pemerintah terhadap kerukunan umat beragama

5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis dan konseptual, yaitu :

- i. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, dan pemerintah agar memberdayakan lembaga adat dalam kehidupan bermasyarakat dan hubungan antar umat beragama
- ii. Secara teoritis dapat menjadi kerangka konseptual dalam membina kerukunan umat beragama di daerah yang multi etnik dan religi yaitu dengan aktualisasi dan pemberdayaan institusi lokal sebagai pengikat keseimbangan masyarakat.